

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ADIL GENDER DI PONDOK PESANTREN AL – MUAYYAD SURAKARTA

Vikri Zahara, Siany Indria Liestyasari, dan Nurhadi

Pendidikan Sosiologi Antropologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

vikrizahara205@gmail.com

Abstrak

Implementasi pendidikan adil gender di pondok pesantren Al – Muayyad Surakarta belum dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum santri putra dan santri putri diberikan hak pendidikan yang sama di bidang akademik dan non akademik namun masih terjadi perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari proses pendidikan. Belum optimalnya implementasi pendidikan adil gender di pondok pesantren Al – Muayyad Surakarta dikarenakan kendala kultural yang mengakibatkan adanya kebijakan kurang responsif gender. Kendala kultural yang dimaksud yaitu sistem patriarki. Pada sistem patriarki laki-laki mengontrol kerja perempuan. Implikasinya santri putra menempati otoritas utama di lingkungan pesantren. Dalam analisa teori *nature* dan *culture*, perempuan dan fungsinya diidentikkan dengan “kehidupan”, menempatkan dirinya dekat dengan alam. Berbeda dengan laki-laki yang sepenuhnya bebas dengan proyek “budaya”. Perempuan yang diidentifikasi sebagai “alam”, dianggap sebagai orang yang berkaitan erat dengan sektor domestik. Sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Begitu juga di pesantren Al – Muayyad masih memperlakukan santrinya dengan dikotomi peran tersebut. Akibatnya santri putri mempunyai akses terbatas untuk mengikuti kegiatan di luar pesantren. Selain itu santri putra juga masih mendominasi pengambilan keputusan dalam rapat gabungan. Santri putri juga tidak bisa menempati posisi teratas dalam struktur organisasi. Subordinasi pada santri putri juga terlihat dari minimnya

kesempatan untuk tampil di depan umum. Karena sesuatu yang massal dan bergengsi dianggap sebagai wilayah laki – laki. Akhirnya pengalaman yang didapat santri putra lebih banyak. Dampaknya bekal yang diterima santri putri untuk persiapan terjun ditengah masyarakat tidak sebesar santri putra.

Kata Kunci : Pendidikan, Keadilan Gender, Pesantren

Abstrack

The result of this study is the gender equitably education in Al-Muayyad Islamic Boarding School not yet optimally implemented. Although the male and female students are given the equal rights in academic or non-academic education, but there are some differences of access, participation, control, and benefit from the education process. The not optimally implementation of the gender equitably education in Al-Muayyad Islamic Boarding School Surakarta is because cultural constraints that made the policy less responsive to gender. The cultural constraints is the patriarchy system where put male to control over female job or activity. The implication of this system is the male students take the main authority in the boarding school environment. In the theory of nature and culture, female and her function is identified as “living”, that place herself close to the nature. It is different with the male that identified free with the cultural works. Female that identified as “nature”, is considered a person who close to the domestic sector. Meanwhile, male are placed as group that work on the public sector. The same conditions are also happen in Al-Muayyad Islamic Boarding School that still treats their student with the dichotomy. As the result, the female students only have limited access to have an activity outside the school. Female students also unable to sit on the top of organization hierarchy. In the other hand, the male students are still dominant in decision making. The subordination to the female students also can be seen from the small opportunity to appear in public, because something that prestigious is considered as the male area. In the end, the experience that acquired by the male students is richer than the female students and the female students will get less prepared to live in the society.

Keyword: Education, Gender Equality, Islamic boarding school

Pendahuluan

Dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya – upaya kongkrit dalam mengatasi ketidakadilan gender melalui kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) yang dikenal sebagai Inpres No. 9 Tahun 2000. Sejumlah undang – undang dan peraturan pemerintah ditetapkan sebagai instrumennya, tetapi lebih dari itu adalah diperlukan dukungan riil dari masyarakat agar tujuan PUG dalam mewujudkan masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk mencapai kesejahteraan sosial dapat tercapai (Mufidah, 2010 : v).

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional salah satunya dilakukan pada lembaga pendidikan dimana hal ini merupakan kebijakan implementatif. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, maka

keterlaksanaannya pada semua lembaga formal merupakan keharusan, termasuk pondok pesantren. Maka pesantren dituntut untuk melakukan *re – design* kurikulum pengajaran, menjadi wacana pembelajaran “*gender social inclusion*”, yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman, dan cara belajar peserta didik yang disebabkan oleh konstruksi sosial pada lingkungannya. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki agar laki – laki maupun perempuan memiliki akses (kesempatan) dan partisipasi yang sama dalam proses pendidikan, memiliki kontrol atau wewenang yang seimbang atas sumber daya, dan mendapatkan manfaat hasil pendidikan secara merata. Implementasi PUG dalam bidang pendidikan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari keseluruhan program, namun PUG diintegrasikan ke dalam strategi pendidikan yang ada, terpadu dan meresap kedalam empat fungsi utama manajemen mutu pendidikan

yaitu : perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (Suriani, 2015: 40).

Terbitnya instruksi presiden RI nomor 09 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Pondok pesantren merupakan Pusat Pendidikan Islam, dakwah, dan pengabdian masyarakat tertua di Indonesia. Lembaga ini dikenal memiliki sistem pendidikan dengan ciri – ciri dan karakteristik yang khas. Keberadaanya sampai sekarang masih berdiri kokoh di tengah – tengah masyarakat, dengan menampakkan kebhinekaan dan kemandirian, seiring dengan proses Islamisasi di Indonesia. Meski demikian, besarnya kontribusi pesantren dalam pengembangan ajaran Islam di Indonesia menyisakan satu problem mendasar, yaitu terkait dengan isu kesetaraan dan gender. Hal ini terlihat pada adanya kesenjangan akses, partisipasi, peran, dan tanggung jawab yang dimiliki

pelajar (santri) putra dan putri, baik pada aspek pengambilan kebijakan, sistem manajerial, pembelajaran, bahan ajar, dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Akibatnya, output santri putra memiliki potensi lebih besar untuk memainkan peran publik di tengah – tengah masyarakat. Kesenjangan tersebut juga berdampak pada kelangkaan ulama' perempuan yang kontribusinya justru sangat dibutuhkan, terutama dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan untuk mencapai *Millenium Development Goals* dan untuk mengatasi isu – isu gender khususnya di kalangan masyarakat muslim (Mufidah, 2010: 2).

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengarusutamman gender wajib diimplementasikan dalam berbagai bidang salah satunya bidang pendidikan termasuk pesantren. Dimana pesantren identik dengan pemeliharaan ortodoksi agama yang kuat. Dengan adanya realita tersebut, peneliti melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menjawab 1) bagaimana bentuk – bentuk implementasi pendidikan adil gender di pondok pesantren Al – Muayyad

Surakarta, 2) Apa saja kendala yang dihadapi pihak pesantren Al – Muayyad Surakarta dalam mengimplementasikan pendidikan.

Kajian Pustaka

Konsep Gender

Menurut Mosse gender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama - sama memoles “peran gender” (Mosse, 2007: 02)

Sherry B Ortner dalam (Woman, Culture and Society 1974: 73) menyatakan bahwa : *“woman’s body and its functions, more involved more of the time with “species life”, seem to place her closer to nature, in contrast to man’s physiology, which frees him more completely to take up the projects of culture”*. Maksud hal tersebut bahwa tubuh perempuan dan

fungsinya lebih cenderung dengan “kehidupan”, menempatkan dirinya dekat dengan alam, berbeda dengan laki-laki yang sepenuhnya bebas dengan proyek budaya. Maksudnya, perempuan selalu diidentikkan dengan kehidupan. Ia memiliki rahim, di dalam rahim tersebutlah sebuah kehidupan baru mulai terbentuk dan tumbuh. Sherry B. Ortner juga mengemukakan bahwa tubuh perempuan yang lebih hebat dengan fungsi alam sekitar reproduksi, ia lebih dipandang sebagai bagian dari alam daripada pria. *“Because of woman's greater bodily involvement with the natural functions surrounding reproduction, she is seen as more a part of nature than is man”* (Ortner, 1974: 76). Menurut Ortner (Ortner, 1974:79), karena laki-laki tidak memiliki “natural” dasar untuk orientasi keluarga, maka mereka membuat “natural” milik laki-laki yaitu agama, ritual, politik, dan lain-lain. Tidak hanya dengan “culture”, laki-laki juga diidentifikasi dengan kreativitas sebagai lawan dari “nature”.

Dari berbagai definisi diatas yang dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan persamaan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif.

Konsep ketidakadilan gender

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan laki – laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa. *Gender differences* (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan gender inequalities (ketidakadilan gender). Namun, yang menjadi masalah ternyata *gender difference* ini telah

menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki – laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role* (peran gender) sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Dengan demikian, *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences* (Nugroho, 2008: 09). Ketidakadilan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1) Marginalisasi.

Menurut Djunaedi (2008:17) marginalisasi adalah menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam faktor ekonomi, sekalipun perannya sangat krusial.

2) Subordinasi

Menurut Nugroho (2008: 11) subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional, atau irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin.

3) Stereotipe

Stereotipe merupakan pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Salah satu contoh pelabelan terhadap perempuan adalah pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang rawan sehingga harus dijaga dan dibatasi, agar tidak terkena gangguan sampai pada saatnya menikah.

4) Violence

Menurut Nugroho (2008:13) Violence atau kekerasan merupakan invasi atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang

dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender.

5) Beban Ganda

Menurut Fakih (1999: 21) adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Terlebih – lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Konsep Adil Gender

Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Fakih, 1999: 29). Adapun indikator keadilan gender adalah sebagai berikut:

Pertama, akses yaitu peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Kedua, partisipasi yaitu keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan atau dalam pengambilan keputusan. Ketiga, kontrol yaitu penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Keempat, manfaat yaitu kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal.

Teori Nature Culture

“Woman’s body and its functions, more involved more the time with “species life”, seem to place her close to nature, in contrast to man’s psychology, which frees him more completely to take up the project of culture” (Ortner, 1974: 73) Sherry B. Ortner dalam *Woman, Culture and Society* menyatakan bahwa tubuh perempuan dan fungsinya lebih cenderung dengan “kehidupan”,

menempatkan dirinya dekat dengan alam, berbeda dengan laki-laki yang sepenuhnya bebas dengan proyek budaya. Maksudnya, perempuan selalu diidentikkan dengan kehidupan. Ia memiliki rahim, di dalam rahim tersebutlah sebuah kehidupan baru mulai terbentuk dan tumbuh. Setelah sembilan bulan lalu janin tersebut keluar ke dunia. Bayi yang sudah keluar dari rahim mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) agar dapat bertahan hidup dengan baik. Selain itu, perempuan juga memiliki periode menstruasi setiap bulannya. Semua hal tersebut secara alami dimiliki oleh perempuan. *“because of woman’s greater bodily involvement with the natural functions surrounding reproduction, she is seen as more a part of nature than is man”* (Ortner, 1974: 76) Bahwa tubuh perempuan yang lebih hebat dengan fungsi alam sekitar reproduksi, ia lebih dipandang sebagai bagian dari alam daripada pria. *“Since men lack a “natural” basis (nursing, generalized to child care) for a familial orientation, their sphere of activity is defined at level of interfamilial relation. And hence, so the cultural reasoning seems to go,*

men are the “natural” proprietors of religion, ritual, politics, and other realms of cultural thought and action in which universalistic statement of spiritual and social synthesis are made” (Ortner, 1974: 79) Menurut Ortner, karena laki-laki tidak memiliki “*natural*” dasar untuk orientasi keluarga, maka mereka membuat “*natural*” milik laki-laki yaitu agama, ritual, politik, dan lain-lain. Tidak hanya dengan “*culture*”, laki-laki juga diidentifikasi dengan kreativitas sebagai lawan dari “*nature*”.

Implikasi dari perbedaan “*nature*” dan “*nurture*” tersebut adalah terjadinya pemisahan sektor kehidupan. Perempuan yang diidentifikasi sebagai “*nature*”, dianggap sebagai orang yang berkaitan erat dengan sektor domestik. Sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan (Abdullah, 2006: 4).

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana bentuk – bentuk implementasi pendidikan adil gender yang dilakukan pihak pesantren Al Muayyad. Penelitian ini menggunakan metode etnometodologi. Tujuan etnometodologi adalah pemaknaan pada situasi yang bersifat lokal, terorganisasi, memiliki stereotype dan ideologi khusus dalam hal ini gender. Dalam penelitian kualitatif, etnometodologi memusatkan kajiannya pada realita yang memiliki penafsiran praktis. Sumber data dari penelitian ini yaitu (1) informan, pengasuh, santri dan pengurus. (2) peristiwa atau aktivitas, yaitu berupa aktivitas pembelajaran berorganisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, (1) wawancara terstruktur dan mendalam. (2) observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif yang memiliki tahapan pertama reduksi data, kedua sajian data, dan ketiga kesimpulan data.

Hasil penelitian dan pembahasan

Bentuk Implementasi Pendidikan Adil Gender

Secara umum, pembelajaran pada asrama putra dan asrama putri di Al - Muayyad adalah sama, misalnya pengajian kitab kuning sesuai dengan tingkat usia dan kematangan berfikir para santri. Misalnya kitab Ta'lim al-Muta'alim, Matanahwu suja', Imriti, Riyad al-Shalihin, Wasoya, Arbain Nawawi, dan berganti – ganti kitab diseputar tasawuf dan fikih. namun masalah kesamaan akses, pesantren Al - Muayyad masih memberlakukan kebijakan berbeda. Misalnya peraturan tentang boleh tidaknya santri putri mengaji di luar asrama. bahwa akses untuk mendapatkan tambahan pengetahuan melalui pengajian - pengajian kitab di luar asrama berbeda antara santri putra dan santri putri. Dari keterangan UL diketahui yang menjadi pertimbangan berbedanya akses untuk mengikuti kegiatan di luar asrama adalah untuk memelihara tradisi pesantren, menjaga kehormatan dan martabat santri putri. Dibukanya akses yang sama antara santri putra dan santri

putri akan memudahkan mereka saling bertemu dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan masalah yang tidak diinginkan. Dengan demikian santri putri cukup belajar sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran di asrama yang dibimbing oleh nyai dan ustadzah yang memiliki kapasitas keilmuan terbatas di bawah kualitas kyai dan ustadh – ustadh yang mengajar di asrama putra. Ustadh dihadirkan pada hari tertentu untuk membantu kyai dan ustadzah mengajar asrama putri jika dianggap perlu. Karena itu tidaklah heran jika terjadi kesenjangan penguasaan kitab kuning antara santri putra dan santri putri akibat dari sistem kebijakan pesantren. Berbeda dengan santri putra mereka memiliki akses yang cukup longgar mengaji kitab kuning kepada ustad - ustad yang berdomisili di luar asrama.

Dalam aspek kontrol sumber daya, partisipasi santri putri juga masih lebih sedikit dibanding santri putra. Hal ini dibuktikan dalam mengadakan kegiatan yang bernama “*bahtsul masail*”. Maksud dari “*bahtsul masail*” yaitu forum yang

dibuat pesantren untuk membahas masalah - masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama. Peserta "*Bahtsul Masa'il*" terdiri dari para santri, pak kyai sebagai narasumber dan ustadz sebagai moderator. Masalah - masalah yang dibahas tidak hanya masalah agama tetapi juga masalah sosial yang aktual. Dalam forum *bahtsul masail* (musyawarah hukum) santri putri tidak diikutsertakan. Mereka hanya menerima apa yang menjadi keputusan *bahtsul masail* putra tanpa mengetahui bagaimana proses jalannya kegiatan. Hal ini secara langsung atau tidak semakin menegaskan minimnya kemampuan santri putri dalam kitab kuning daripada santri putra. Selain itu terdapat pula materi pelajaran yang tidak diberikan kepada santri putri namun diberikan kepada santri putra ataupun sebaliknya. Jika santri putra mendapatkan pelajaran Ilmu Falak, maka tidak demikian dengan santri putri. Alasan yang dikemukakan adalah adanya keilmuan yang dianggap lebih penting untuk dipelajari bagi santri putri yaitu kitab

Risalatul Mahid, suatu kitab yang membahas tentang menstruasi dan permasalahannya.

Perbedaan semakin tampak ketika santri putra mendapatkan pelajaran juga tentang kitab ini dalam bentuk diklat, namun tidak demikian bagi santri putri. Meskipun keduanya diberikan akses yang sama untuk mengikuti organisasi ikatan pelajar ma'had Al - Muayyad namun masih terjadi kesenjangan dalam aspek kontrol sumber daya. Hal ini diakui sendiri oleh seorang santri putri bernama SV, yang menerangkan kasus kontrol sumber daya ini. Dalam rapat rapat gabungan (IPMA Putra dan IPMA Putri) yang membicarakan agenda besar pesantren misalnya. Santri putra memiliki kharisma yang lebih tinggi dari santri putri. Ini terlihat dari pendapat yang diajukan oleh kedua santri putra dan putri tersebut ketika rapat. Pendapat santri putra lebih didengarkan dari pada santri putri. Forum gabungan ini seakan menjadi diskusi yang terpusat pada pemikiran santri putra. Meskipun sama - sama diberi akses untuk mengikuti organisasi "IPMA" namun kesenjangan peran yang di

dapatkan santri putra dan putri masih jelas terlihat. Hal ini diketahui peneliti saat melakukan wawancara dengan informan. Santri putri yang bernama LU menyatakan bahwa di setiap akhir tahun ada agenda rutin yang digelar pesantren seperti haul. Haul merupakan acara untuk mengenang hari wafatnya pendiri pondok pesantren Al - Muayyad yaitu KH. Ahmad Umar Abdul Mannan. Acara ini mengundang instansi lain dan juga kerabat pondok pesantren. Agenda haul diwarnai dengan pembacaan doa, tahlil dan solawat serta pengajian dan hiburan islami. Setiap tahun akan dibentuk kepanitiaan yang khusus mengurus acara haul ini. Namun nyatanya dalam pengambilan peran posisi santri putri masih berada dibawah santri putra. Santri putra mendapat tugas sebagai koordinator, ketua, sie publikasi dan juga bendahara. Sedangkan tugas - tugas yang berhubungan dengan tamu akan diserahkan kepada santri putri. Seperti penerima tamu, mengurus konsumsi, menyiapkan hiasan dekorasi, serta membersihkan lingkungan pesantren. Pembagian

peran yang berbeda ini seolah memisahkan bahwa santri putra mendapat peran - peran publik sedangkan putri mendapat peran domestik.

Meskipun keduanya diberikan akses untuk mengikuti pelatihan muhadoroh di pesantren namun manfaat yang mereka terima dalam kegiatan ini masih berbeda antara santri putra dan santri putri. Kebiasaan pengasuh yang mengirimkan santri putra senior untuk mengisi pengajian di daerah sekitar yang menjadi masalah. Santri yang dikirim ke daerah tersebut umumnya didominasi oleh putra karena dirasa lebih aman daripada mengirim santri putri, disamping memang selama ini banyak masyarakat yang memang meminta penceramah laki - laki, kecuali untuk pengajian khusus ibu-ibu atau anak-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa domestifikasi peran perempuan dalam kegiatan sosial religius. Peran santri putri dianggap hanya berhubungan dengan aktivitas yang lebih sederhana, bersifat domestik dan lebih mementingkan unsur keperempuanan. Kegiatan yang

bersifat massal dan yang lebih bergengsi dianggap sebagai wilayah laki-laki.

Setiap ada kegiatan seperti perpisahan dan haul yang ditampilkan untuk mengisi acara adalah kelompok hadroh dari santri putra. Sehingga santri putri jarang mendapat kesempatan untuk tampil dalam acara yang sama. Hadroh putra juga sering diikutsertakan dalam agenda karnaval kota Surakarta. Pada acara pengajian rutin mengisi acara rata - rata diambil perannya oleh sosok laki - laki bahkan sosok perempuan sama sekali tidak diberi porsi untuk turut meramaikan acara pengajian. Mulai dari pak kyai sebagai pembuka acara, kemudian santri putra juga yang membaca tilawah Al quran bahkan mengisi acara seni juga yang ditugaskan adalah kelompok hadroh santri putra. Disisi lain santri putri pun juga memiliki kelompok hadroh, namun kelompok santri putri tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memeriahkan acara pengajian. Secara tidak langsung hal ini menyiratkan bahwa panggung adalah milik laki - laki. Kultur patriarkhi ini semakin nampak ketika Al - Muayyad selalu

mengundang alumni santri putra untuk mengisi pengajian. Jarang didapati pesantren mengundang alumni santri putri untuk mengisi dalam pengajian rutin di Al - Muayyad.

Analisis culture nature

Menurut UL menjaga perempuan lebih sulit daripada laki - laki. Pernyataan tersebut menyimpulkan yang menjadi pertimbangan berbedanya akses untuk mengikuti kegiatan diluar asrama adalah untuk memelihara tradisi pesantren, menjaga kehormatan dan martabat santri putri. Perempuan dianggap sebagai sosok yang rawan dan lemah sehingga akses untuk keluar harus dibatasi sebagai upaya untuk melindungi perempuan itu sendiri. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Deaux dan Kite dalam Partini (2013: 18) bahwa gender didukung oleh sistem kepercayaan gender (*gender belief system*). Dalam bukunya Bias Gender dan Birokrasi, Partini juga menyebutkan pendapat Deaux dan Kite, bahwa sistem kepercayaan gender mencakup elemen diskriptif,

yaitu kepercayaan tentang bagaimana “sebenarnya” laki-laki dan perempuan, serta bagaimana “seharusnya” laki-laki dan perempuan bersikap. Pernyataan UL menunjukkan adanya sistem kepercayaan gender yang sudah terbangun di pesantren Al Muayyad, sebagai wujud dari sistem kepercayaan gender tersebut munculah aturan tentang bagaimana santri putra dan santri putri harus berperilaku dan bersikap. Santri putra diberi kelonggaran untuk mengaji di luar pesantren karena dianggap sebagai sosok yang kuat dan bisa melindungi dirinya sendiri, sedangkan santri putri dianggap sebagai sosok yang lemah maka harus dijaga oleh yang lebih kuat. Dampaknya santri putri cukup mengaji kitab dipondok pesantren saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari pihak pondok.

Dampaknya pengalaman dunia luar pesantren yang didapat santri putra lebih banyak dibanding santri putri. Dari penjelasan diatas mengenai perbedaan akses yang didapat oleh santri putra dan putri di Al - Muayyad menunjukkan bahwa

terjadinya keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena dikonstruksi oleh budaya yang dipengaruhi oleh peluang laki-laki yang lebih besar untuk berperan aktif terhadap dunia luar. Menurut Abdullah (2006: 7) laki-laki yang memiliki akses yang lebih besar terhadap sektor produktif kemudian dikonstruksikan untuk berperan sosial di sektor publik, sedangkan perempuan mempunyai tugas mulia 4 M (menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui) dikonstruksikan untuk berperan di sektor “sosial domestik”, yaitu menguasai rumah tangga, anak dan melayani laki-laki (suami). Perempuan yang baik dipresentasikan sebagai ibu maupun istri yang terkait dengan rumah, anak, masakan, pakaian, kecantikan, kelembutan, dan keindahan.

Menurut Achmad dalam Partini (2013: 17) ideologi gender merupakan ideologi yang mengkotak-kotakkan peran dan posisi ideal perempuan didalam rumah tangga dan masyarakat. Peran ideal inilah yang akhirnya menjadi sesuatu yang aku dan stereotip. Ideologi gender

seringkali menyudutkan perempuan dalam konteks kefeminimannya, sehingga yang dilakukan perempuan hanyalah untuk memantaskan diri sebagaimana telah digariskan sesuai dengan kodrat dan stereotip yang sudah menjadi hal yang baku didalam masyarakat. Stereotype gender dapat dilihat dari adanya kegiatan yang disebut dengan "*Bahtsul Masail*". Bahtsul masail merupakan forum yang diadakan oleh pesantren untuk membahas masalah – masalah yang muncul dikalangan masyarakat yang belum ada hukum dan dalilnya dalam agama. Jadi bahtsul masail bisa dikatakan sebagai musyawarah hukum mengenai masalah sosial. Namun dalam forum ini santri putri tidak diikutsertakan. Mereka hanya menerima apa yang menjadi keputusan bahtsul masail yang dilakukan santri putra bersama ustadz dan pak kyai sehingga santri putri tidak mengetahui bagaimana proses jalannya kegiatan. Santri putri bisa mengetahui hasil dari bahtsul masail yang dilakukan santri putra dan para ustadz dan kyai ini lewat majalah pondok pesantren yaitu serambi Al - Muayyad. Hal ini secara tidak

langsung semakin menandakan bahwa kemampuan santri putri dalam menguasai kitab kuning diragukan. Sehingga persepsi yang terbangun bahwa ranah berpikir adalah ranah yang pantas dipegang oleh laki – laki. Laki – laki dianggap sebagai pribadi yang cocok sebagai pengambil keputusan karena mempunyai pemikiran logis, sebaliknya sosok santri putri diibaratkan sebagai sosok yang kurang kompeten dalam ranah berfikir sehingga tidak diikutsertakan. Stereotype negatif bahwa santri putri kurang logis menyebabkan mereka hanya bisa sebagai penikmat hasil dari adanya bahtsul masail. Semakin partisipasi perempuan rendah dalam kegiatan bahtsul masail ini, maka semakin mengukuhkan stereotipe perempuan sebagai sosok penurut terhadap laki – laki. Adanya kebijakan santri putri hanya menerima apa yang menjadi keputusan musyawarah hukum (bahtsul masail) dari santri putra semakin menguatkan lemahnya kontrol terhadap sumber daya di pesantren oleh santri putri.

Menurut Abdullah (2006: 84) di dalam tatanan sosial yang dilandasi

pada sistem hubungan yang patriarkis, segala kegiatan perempuan dan persepsi masyarakat terhadap status dan posisi perempuan, dilingkupi oleh nilai-nilai yang memihak kepada pria. Nilai-nilai yang patriarkis tersebut diinternalisasikan dan dilanggengkan melalui berbagai institusi sosial seperti lembaga politik, pendidikan, maupun kepercayaan-kepercayaan, sehingga subordinasi tersebut tidak dirasakan sebagai suatu sistem yang secara langsung sangat menekan dan memojokkan perempuan. Sama halnya dengan pernyataan LU yang merasa bahwa pemberian materi berbeda adalah suatu kewajiban karena LU sudah menginternalisasi kepercayaan - kepercayaan yaitu mempelajari hal - hal yang berkaitan dengan kodratnya (menstruasi) adalah cukup. Sehingga santri putri tidak merasakan adanya posisi penomorduaan dibanding santri putra. Meskipun keduanya diberikan akses yang sama untuk mengikuti organisasi ikatan pelajar namun juga masih terjadi kesenjangan dalam aspek kontrol sumber daya. Menurut Hartman dalam Partini (2013: 15)

pada sistem patriarki, laki-laki mengontrol kerja perempuan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Diakui sendiri oleh seorang santri putri bernama SV pada saat rapat - rapat gabungan yang membicarakan agenda besar pesantren seperti acara khataman, haul, peringatan hari kemerdekaan. Menurutnya dalam forum rapat gabungan santri putra memiliki kharisma yang lebih tinggi dibanding dengan santri putri. Forum gabungan ini seolah - olah menjadi diskusi yang terpusat pada pemikiran santri putra. Akibatnya pengambilan keputusan seringkali menggunakan pemikiran santri putra yang dijadikan sebagai acuan. Seorang pengurus bernama DW juga menambahkan bahwa meskipun pondok pesantren Al - Muayyad memiliki kebijakan pengurus putra dan putri untuk mengelola asrama dengan perwakilan pengurus masing - masing namun faktanya keputusan rapat juga didominasi oleh pengurus dari pihak laki - laki. Dominasi pengambilan keputusan ini dampak dari sistem negosiasi yang masih lemah. Setiap keputusan yang dihasilkan dari rapat pengurus putri biasanya selalu

dikoordinasikan dulu dengan pengurus asrama putra. Artinya santri laki - laki mengontrol apa yang menjadi keinginan dari santri putri.

Kaitannya dengan pengkotak – kotakan peran laki – laki dan perempuan Ortner (1974: 73) menyatakan bahwa tubuh perempuan dan fungsinya lebih cenderung dengan “kehidupan”, menempatkan dirinya dekat dengan alam (nature), berbeda dengan laki-laki yang sepenuhnya bebas dengan proyek “budaya” (culture). Maksudnya, perempuan selalu diidentikkan dengan kehidupan. Ia memiliki rahim, di dalam rahim tersebutlah sebuah kehidupan baru mulai terbentuk dan tumbuh. Setelah sembilan bulan lalu janin tersebut keluar ke dunia. Bayi yang sudah keluar dari rahim mendapatkan ASI (Air Susu Ibu) agar dapat bertahan hidup dengan baik. Selain itu, perempuan juga memiliki periode menstruasi setiap bulannya. Semua hal tersebut secara alami dimiliki oleh perempuan. Ortner juga mengemukakan bahwa tubuh perempuan yang lebih hebat dengan fungsi alam sekitar reproduksi, ia lebih dipandang sebagai bagian dari

alam daripada pria. Menurut Ortner, karena laki-laki tidak memiliki “*natural*” dasar untuk orientasi keluarga, maka mereka membuat “*natural*” milik laki-laki yaitu agama, ritual, politik, dan lain-lain. Tidak hanya dengan “*culture*”, laki-laki juga diidentifikasikan dengan kreativitas sebagai lawan dari “*nature*”.

Abdullah (2006: 4) menjelaskan bahwa implikasi dari perbedaan “*nature*” dan “*culture*” tersebut adalah terjadinya pemisahan sektor kehidupan. Perempuan yang diidentifikasikan sebagai “*nature*”, dianggap sebagai orang yang berkaitan erat dengan sektor domestik. Sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan. Meskipun sama - sama diberikan akses untuk mengikuti organisasi ikatan pelajar mahad Al - Muayyad namun kesenjangan peran yang didapatkan santri putra dan putri

juga masih terlihat. Santri putri yang bernama LU menyebutkan bahwa di setiap akhir tahun ada agenda rutin yang digelar pesantren seperti haul. Haul merupakan agenda rutin yang merupakan tradisi pondok, bertujuan mengenang hari wafatnya pendiri pondok pesantren Al - Muayyad yaitu KH. Ahmad Umar Abdul Mannan. Dalam acara ini pondok mengundang instansi lain yang hadir memeriahkan haul. Agenda haul diwarnai dengan rangkaian acara doa, tahlil, sholawat serta pengajian dan hiburan islami. Sehingga setiap tahunnya membentuk kepanitiaan khusus untuk mengurus acara ini. Dalam pengambilan peran dan posisi santri putri masih berada dibawah santri putra. Santri putra mendapat tugas sebagai ketua dan koordinator, sie publikasi dan juga bendahara. Sedangkan tugas - tugas yang berhubungan dengan tamu akan diserahkan kepada santri putri. Seperti penerima tamu, mengurus konsumsi, menyiapkan hiasan dekorasi serta membersihkan lingkungan pesantren. Pembagian peran yang berbeda ini seolah menempatkan bahwa santri putra pantas mendapat peran – peran publik

sedangkan santri putri mendapatkan peran domestik. Alison Scott (dalam Saptari & Holzner, 1997:8) menyebutkan bahwa ada 3 bentuk marginalisasi, (1) sebagai proses pengucilan (exclusion), (2) sebagai proses pergeseran perempuan ke pinggiran (margins), (3) sebagai proses feminisasi atau segregasi. Dari 3 bentuk itu, yang dialami oleh para santri putri adalah bentuk dari proses feminisasi, dimana dalam bentuk ini adanya pemusatan tenaga kerja perempuan ke dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu, bisa dikatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan tersebut sudah ter-“feminisasi” (dilakukan semata-mata oleh perempuan).

Abdullah (2006: 3) menyatakan keberadaan perempuan selalu menjadi yang nomor dua dan di bawah laki-laki. Peran dan status perempuan juga tidak terlalu diperhitungkan. Terdapat dikotomi *nature* dan *culture* yang digunakan untuk menunjukkan pemisahan dan stratifikasi di antara dua jenis kelamin ini. Perempuan mewakili sifat “alam” (*nature*) harus ditundukkan agar mereka lebih berbudaya (*culture*). Usaha membudayakan perempuan

tersebut menyebabkan terjadinya proses produksi dan reproduksi ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan hubungan yang memisahkan perempuan mewakili hal-hal domestik sedangkan laki-laki mewakili ranah publik juga terlihat dalam kegiatan non akademik muhadoroh. Sekilas terlihat bahwa pondok memberikan akses bagi santri putra dan putri untuk mengikuti kegiatan muhadoroh. Muhadoroh merupakan kegiatan latihan berdakwah yang diadakan rutin satu minggu sekali. Latihan muhadoroh ini dimaksudkan guna mempersiapkan santri untuk terjun di masyarakat. Meskipun keduanya diberikan kesempatan untuk berlatih muhadoroh namun manfaat yang mereka terima dalam kegiatan ini masih berbeda antara santri putra dan santri putri. Kebiasaan pengasuh yang mengirimkan santri putra senior untuk mengisi pengajian di daerah sekitar lah yang menjadi masalah. Seringkali santri putra mendapat undangan untuk mengisi pengajian maulid nabi, dakwah tentang narkoba, serta undangan dari jamuro (jamaah

muji rosul). Santri yang dikirim ke daerah umumnya didominasi oleh putra karena dirasa lebih aman daripada mengirim santri putri, disamping selama ini memang banyak masyarakat yang meminta penceramah laki-laki, kecuali untuk pengajian khusus ibu-ibu dan anak-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa domestifikasi peran perempuan dalam kegiatan sosial religious masih ada.

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini mengenai implementasi pendidikan adil gender di pondok pesantren Al Muayyad Surakarta dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Implementasi pendidikan adil gender di pondok pesantren Al – Muayyad Surakarta belum dilakukan secara optimal. Meskipun secara umum santri putra dan santri putri diberikan hak pendidikan yang sama di bidang akademik yang terfokus pada kajian kitab kuning serta non akademik yang terfokus pada kegiatan organisasi intra pesantren, *muhadoroh* (dakwah) serta *hadroh* (seni rebana), namun masih terjadi perbedaan akses, partisipasi, kontrol

terhadap sumber daya serta manfaat yang diperoleh dari proses pendidikan di pesantren.

2. Belum optimalnya implementasi pendidikan adil gender di pondok pesantren Al – Muayyad Surakarta dikarenakan kendala kultural yang mengakibatkan adanya kebijakan kurang responsif gender. Kendala kultural yang dimaksud yaitu sistem patriarki. Pada sistem patriarki laki-laki mengontrol kerja perempuan. Kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi.

Daftar Pustaka

- Mufidah. (2010). *Gender di Pesantren Salaf Why Not ?*. Malang : UIN – Maliki Press.
- Saptari, Ratna. (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Abdullah, Irwan. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Partini. (2013). *Bias Gender dalam Birokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fakih, Mansour. (1999). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Rian. (2008). *Gender dan strategi pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djunaedi, Wawan. (2008). *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*. Jakarta : Pustaka STAINU.
- Rosaldo, Louis. (1974). *Woman, Culture and Society*. California: Satndford University Press.
- Mosse, J.C. (2007). *Gender & Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana yogya.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta:UNS Press.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif :Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.